



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAPORAN

KINERJA DAN FAKTA BAPENDA (KITAB)

Triwulan II 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa kinerja instansi pemerintah dilakukan pemantauan secara berkala waktu. Dokumen Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Triwulan II Tahun 2026 merupakan dokumen evaluasi dan pemantauan atas dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2026. KITAB Triwulan II Tahun 2026 sebagai gambaran mengenai capaian realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan pada periode waktu triwulanan.

Capaian realisasi yang masih belum sesuai dari rencana target yang telah disusun, akan ditindaklanjuti serta di evaluasi mengenai kendala dan hambatan yang terjadi serta mencari upaya solusi untu memperbaikinya di masa mendatang. Sementara capaian realisasi yang sudah tercapai untuk terus ditingkatkan kinerjanya. Periode Triwulan II Tahun 2026 ini juga menggambarkan kondisi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan. Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kinerja Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Akselerasi dalam penyerapan anggaran yang mendukung target kinerja pada periode Triwulan II Tahun 2026 terus ditingkatkan, terutama anggaran berbasis kinerja optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam evaluasi dan pemantauan melalui Kurva "S" pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan untuk melihat seberapa besar deviasi keterlambatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya dukungan kinerja (*cross cutting*) baik secara internal maupun eksternal terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Evaluasi serta beberapa catatan dari hasil pemantauan kinerja Triwulan II Tahun 2026 akan ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus ditingkatkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2026 untuk memastikan jaminan ruang kapasitas fiskal daerah untuk peningkatan pelayanan publik ke masyarakat tetap terjamin di era kemandirian dan konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

**KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**
Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

TUJUAN PD

Indikator Tujuan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2026 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tercapai indeks 2,200

SASARAN STRATEGIS

IKSS. 1 Nilai Deviasi 58,69	IKSS. 2 Kemandirian Fiskal 0,59	IKSS. 3 Pertumbuhan Pendapatan (17,19)	IKSS. 4 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB 0,341
IKSS. 5 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah 58,99	IKSS. 6 Realisasi PAD 41,302	IKSS. 7 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Non Migas 0,256	IKSS. 8 Kontribusi PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah 0,725

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

REALISASI

Rp. 68.376.201.300,00

Rp. 10.31.216,00

Rp. 386.428.027,00

31,24 %

8,54 %

6,84 %

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
- Sinergi dan Kolaborasi
- Pengawasan Berbasis Risiko

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Pelaksanaan SIGUNTANG MENYAPA
- Pendataan dan Validasi Kendaraan Bermotor
- *Door to Door Service*
- Operasi Gabungan Bersama Stakeholder
- Penagihan Pajak Daerah

STRATEGIC DIRECTION STATEMENT:

Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat wajib pajak daerah untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Daerah

DAFTAR ISI



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kerangka Logis	5
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Manfaat	8
F. Metodologi Pengukuran Kinerja	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II METODOLOGI	14
BAB III MONITORING KINERJA.....	36
A. Pencapaian Kinerja.....	36
BAB IV EVALUASI DAN TINDAKLANJUT KINERJA	53
A. Kualitas Atas Capaian Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya.....	53
B. Efisiensi Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Mencapai Kinerja	58
C. Hambatan	61
D. Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Dalam Peningkatan Kinerja	66
E. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Berikutnya	71
BAB V PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL



	Halaman
TABEL 2.1 Indeks Indikator Kinerja	15
TABEL 2.2 Hasil Uji Unit Root Test	23
TABEL 2.3 Pemilihan Lag Optimum.....	25
TABEL 2.4 Parameter Akaike Information Criterion (AIC).....	26
TABEL 2.5 Hasil Uji Kointegrasi Johansen.....	26
TABEL 2.6 Hasil Estimasi VEC Model.....	28
TABEL 2.7 Kontribusi Kinerja IKSSO Terhadap IKSS.....	30
TABEL 2.8 Kontribusi Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1	30
TABEL 2.9 Hubungan Cross Cutting Kinerja IKSSO Level 1 Terhadap IKSS.....	31
TABEL 2.10 Hubungan Cross Cutting Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1	32
TABEL 3.1 Capaian Realisasi Kinerja Unit Eselon II	37
TABEL 3.2 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	39
TABEL 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Unit Eselon III dan IV.....	42
TABEL 3.4 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Unit Eselon III/IV	47

DAFTAR GAMBAR



	Halaman
GAMBAR 1.1 Kerangka Logis Penyusunan KITAB	6
GAMBAR 2.1 Diagram Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN).....	15
GAMBAR 2.2 Diagram Tahapan Pemilihan Model.....	18
GAMBAR 2.3 Tampilan Awal evIEWS versi 13.....	22
GAMBAR 2.4 Tampilan Running Data.....	22
GAMBAR 2.5 Distribusi Variabel.....	24
GAMBAR 2.6 Polinomial Variabel	25
GAMBAR 2.7 Variance Decomposition	29



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BABI

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Triwulan II Tahun 2026



A. LATAR BELAKANG

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan atau kegagalan dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam *strategic planning* Perangkat Daerah. Kinerja bisa diketahui hanya jika setiap jenjang level unit kerja tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan dan sasaran atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan sasaran atau target, kinerja setiap jenjang level tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian proses sistematis dari beberapa aktivitas, alat, sumber daya serta prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan, pengklasifikasian, pengiktisaran, metodologi dan analisis, serta pelaporan pada tingkatan level instansi pemerintah/pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan dan kinerja serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari definisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja bagi Bapenda mempunyai nilai manfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pengguna layanan sehingga akan membawa Perangkat Daerah lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh jenjang level dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan (*Customer Perspective*).
- b. Motivasi dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari mata rantai penjejangan kinerja secara internal (*internal process perspective*).
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada (*stakeholder perspective*).
- d. Membuat suatu tujuan dan sasaran strategis menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran Perangkat Daerah (*Learning and Growth Perspective*).
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi *reward* atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Untuk mendukung target dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan kinerja, mengukur kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja sesuai dengan *cascade down* yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Perencanaan kinerja seharusnya merupakan ukuran kinerja yang benar-benar ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Bapenda. Untuk itu, Bapenda telah merencanakan secara matang kondisi yang ingin dicapai dengan target-target yang cukup menantang namun memungkinkan untuk dicapai.

Konsekuensinya, Bapenda akan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk merealisasikan apa yang direncanakannya sehingga prinsip dalam efisiensi dan efektivitas telah digunakan dengan semaksimalnya. Oleh karena itu, perencanaan dilengkapi dengan rencana mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pelaksanaan dan pemantauan kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memuat standart baku dalam pemantauan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (Laporan KITAB) yang dipantau serta dievaluasi secara berkala waktu (bulanan dan triwulanan).

Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (Laporan KITAB) merupakan laporan kinerja yang memuat dan menyajikan berbagai informasi:

1. Pencapaian kinerja;
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD/Renstra Perangkat Daerah;
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya dalam dokumen perencanaan jangka menengah;
5. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* kinerja) bersifat optional;
6. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
7. Efisiensi sumber daya yang digunakan dalam mencapai kinerja;
8. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dalam peningkatan kinerja;
9. Evaluasi hasil memberikan impact pada perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

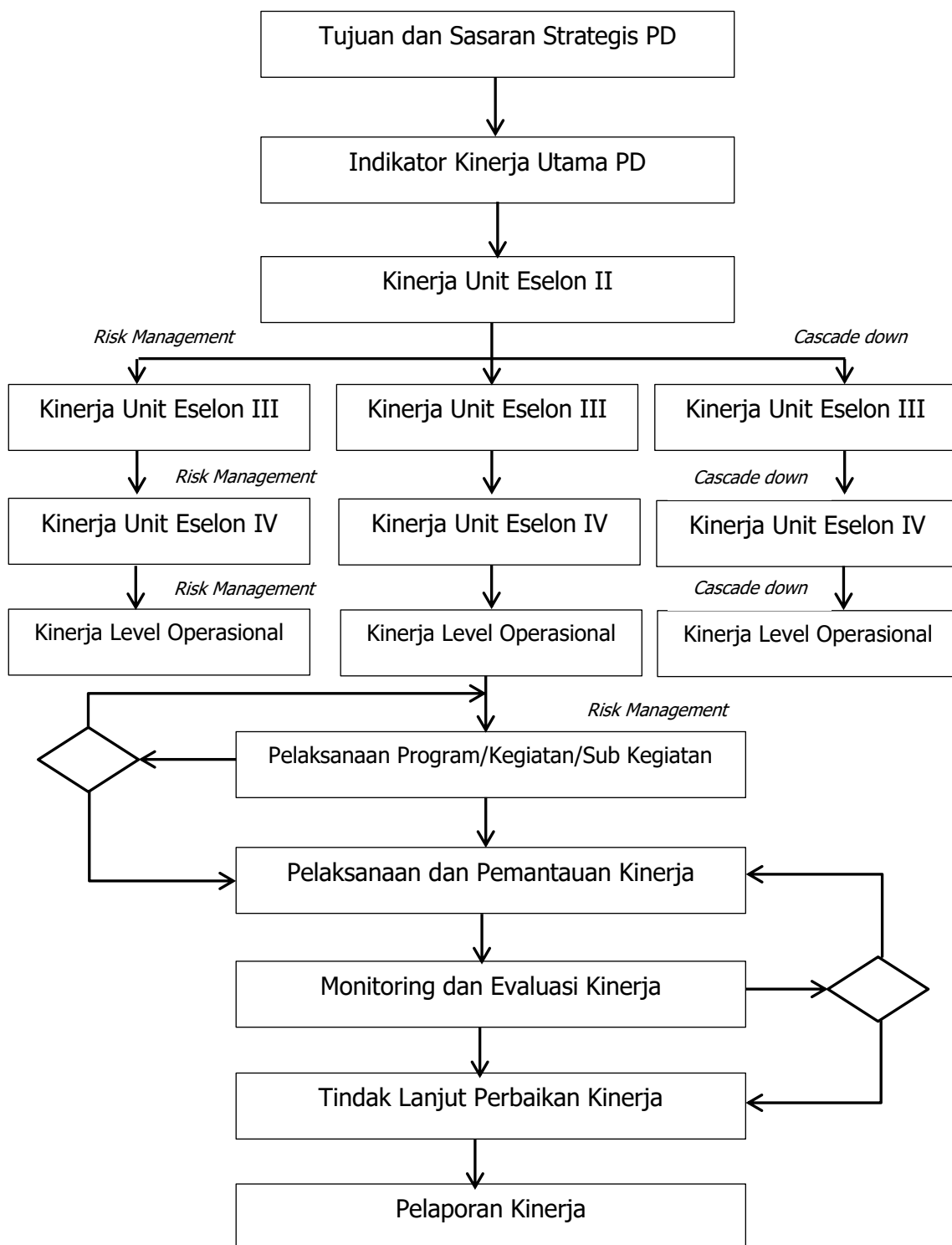
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tahapan terpenting dalam perencanaan kinerja yaitu berikutnya adalah mengukur keberhasilan/kegagalannya dalam merealisasikan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Bapenda melakukan pengukuran kinerja agar dapat memahami kinerjanya yang realistis, menantang dan dapat diukur, selanjutnya melakukan pemantauan dan pengendalian dalam upaya pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Dalam hal pengukuran kinerja dapat membedakan mana kelompok kinerja yang mempunyai kategori berhasil dan mana kelompok kinerja yang mempunyai kategori gagal. Dengan pemahaman ini, Bapenda dapat mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan yang sama pada periode-periode berikutnya. Pemahaman ini akan cenderung untuk memberikan *reward and punishment*. Dalam bentuk paling ringan kesalahan ini bisa berupa tidak memberikan *punishment* pada kelompok kinerja yang gagal atau tidak memberikan *reward* kepada yang berhasil, sedangkan dalam bentuk yang paling merugikan adalah berupa tidak memberikan *reward* pada yang gagal atau memberikan *punishment* kepada yang berhasil.

B. KERANGKA LOGIS

Kerangka logis dalam penyusunan Laporan KITAB ini dimulai dengan perumusan tujuan dan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, mengidentifikasi dan menetapkan Kinerja Unit Eselon II, mengidentifikasi dan menganalisa penjenjangan kinerja (*cascade down*) Unit Kerja Eselon III sampai dengan level operasional staff, mengidentifikasi dan menganalisa Risiko Strategis (RSO) dan Risiko Operasional (ROO) Perangkat Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pelaksanaan dan pemantauan pengukuran kinerja, Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja, tindak lanjut pelaksanaan kinerja serta pelaporan kinerja, secara diagram kerangka logis tergambar sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Logis Penyusunan KITAB

C. TUJUAN KITAB

Secara umum tujuan dibuatnya Laporan KITAB ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja serta mendorong peningkatan capaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (*outcomes*) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Laporan KITAB ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa capaian kinerja setiap jenjang level telah berhasil atau tidak;
2. Menilai tingkat kinerja akuntabilitas setiap level;
3. Memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kinerja unit kerja;
4. Sebagai dokumen kendali atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya dan memberikan gambaran apa yang akan dicapai dalam jangka menengah.

D. RUANG LINGKUP KITAB

Monitoring dan evaluasi melalui Laporan KITAB ini menjadi basis data kinerja unit kerja yang meliputi aktivitas monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan kinerja jangka menengah maupun jangka pendek termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi atas hasil pencapaian kinerja.

Dalam pelaporannya, KITAB mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kualitas atas perencanaan kinerja yang selaras dan *cascade down* terhadap tujuan dan sasaran strategis yang *sustainable*;
2. Pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level dan berkelanjutan menjadikan kebutuhan dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis unit kerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya/perbaikan yang dilakukan memberikan umpan balik untuk menentukan strategi/kebijakan yang tepat mencapai kinerja;

4. Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong timbulnya impact positif dalam peningkatan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi kinerja berkelanjutan;
5. Capaian kinerja pada level output (sub kegiatan) dan level outcomes (program/tujuan/sasaran) serta memberikan impact positif untuk kinerja.

E. MANFAAT

Adapun nilai manfaat dari adanya evaluasi dan pemantauan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) adalah:

- Mengidentifikasi atau mengetahui terpenuhinya keinginan dan ekspaktasi layanan kepada masyarakat atau pelanggan serta memastikan bahwa layanan Bapenda *delivered*;
- Membantu Bapenda memahami lebih dalam proses atau apa yang (selama ini) dilakukannya dan tujuan yang ingin dicapai;
- Memastikan bahwa keputusan yang diambil (telah) berdasarkan fakta atau data kinerja;
- Mengetahui dimana (pada tahap apa) perbaikan perlu dilakukan dan bagaimana memperbaikinya;
- Mengetahui apakah perbaikan benar-benar telah dilakukan (terjadi)
- Mengungkapkan permasalahan yang selama ini (mungkin) belum diketahui;
- Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja;
- Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja;
- Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi;
- Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif;
- Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan;

- Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Jika selama ini Bapenda bekerja tanpa evaluasi dan pemantauan kinerja, kita mungkin berasumsi bahwa segala sesuatunya dalam keadaan baik. (Hal tersebut mungkin benar mungkin pula tidak, tetapi tanpa evaluasi dan pemantauan kinerja tidak alasan untuk menyatakan tidak ada masalah). Sehingga bisa menimbulkan penerapan pengendalian intern serta manajemen risiko dalam upaya pencapaian kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis.

F. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Siklus pengukuran kinerja merupakan tahap-tahap pengukuran kinerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengukuran kinerja bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Adapun siklus pengukuran kinerja komprehensif pada Bapenda melalui tahap sebagai berikut:

a. Telahaa Terhadap Visi dan Misi RPJMD

Telahaa terhadap visi RPJMD merupakan merealisasikan janji politik dari Kepala Daerah merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua Perangkat Daerah, sedangkan telahaa misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Pada dasarnya pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap ketercapaian visi dan misi RPJMD. Oleh karena itu, organisasi harus berupaya agar semua aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari visi dan misi RPJMD yang telah ditetapkan.

b. Merumuskan Falsafah

Falsafah menyangkut nilai-nilai kinerja yang ditanamkan di Bapenda untuk membentuk karakteristik dan sikap perilaku pegawai terhadap unit kerja, serta membentuk budaya organisasi yang sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau jargon-jargon. Falsafah tidak terpisah dari tujuan dan sasraan strategis, tetapi merupakan turunannya. Penetapan falsafah lebih ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis agar dapat dijiwai setiap jenjang level kinerja sehingga tercipta perilaku pegawai yang tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah;

- c. Menetapkan kebijakan
Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah Perangkat Daerah. Kebijakan ini ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan. Dalam konteks pengukuran kinerja, kebijakan ini berfungsi sebagai bahan masukan dalam menciptakan indikator atau ukuran kinerja.
- d. Menetapkan tujuan
Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan dinyatakan secara eksplisit berikut ukuran waktu pencapaiannya. Dalam konteks pengukuran kinerja, tujuan merupakan pedoman perumusan kriteria kinerja.
- e. Menetapkan sasaran
Sasaran merupakan tujuan Perangkat Daerah yang dinyatakan secara lebih eksplisit, selain diikuti ukuran waktu juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Oleh karena sifatnya yang lebih berwujud, maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan.
- f. Menyusun strategi
Substansi dari strategi sebetulnya adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah diterjemahkan lebih lanjut dari visi dan misi RPJMD. Strategi ini sangat mungkin berubah jika Bapenda menghadapi lingkungan yang sangat turbulent, sehingga perlu dilakukan review agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Pengukuran kinerja juga bertujuan untuk menilai apakah strategi yang ditetapkan sudah diterapkan dengan benar.
- g. Menyusun program kegiatan serta sub kegiatan
Program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah program-program tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bagaimana manfaat dan dampaknya bagi manajemen dan stakeholders.
- h. Menyusun anggaran
Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Anggaran sebenarnya merupakan penjabaran secara terperinci atas program-program yang telah ditetapkan dalam bentuk satuan moneter. Dengan menentukan anggaran, suatu

Bapenda bisa melihat proyeksi keuangan dalam masa satu tahun yang akan datang. Dalam pengukuran kinerja, anggaran berfungsi sebagai ukuran kinerja input.

- i. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- j. Dalam suatu aktivitas pengukuran pasti terdapat sesuatu yang diukur dan kriteria yang digunakan untuk mengukur. Kriteria ini menjadi tolok ukur atas keberhasilan obyek yang diukur. Kriteria pengukuran kinerja organisasi dapat berupa indikator atau ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.
- k. Menetapkan sistem prosedur pengukuran kinerja
Sistem prosedur pengukuran kinerja merupakan aktivitas mengukur kinerja dengan menggunakan indikator kinerja dan ukuran kinerja yang telah dirumuskan. Sistem pengukuran kinerja formal dapat ditetapkan agar bisa mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik dan sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial yang diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Sistem prosedur pengukuran kinerja harus dimasukkan dalam sistem pengendalian formal yang ditetapkan Bapenda. Jadi, sebuah sistem prosedur pengukuran kinerja adalah sub sistem dari sebuah sistem pengendalian formal Bapenda. Dengan demikian dalam menetapkan struktur unit kerja, pusat pertanggungjawaban, perencanaan strategi, pemrograman, dan penganggaran harus juga dipertimbangkan bagaimana teknik pengukuran dan pelaporan kinerjanya.
- l. Implementasi sistem prosedur pengukuran kinerja
Jika sistem prosedur pengukuran kinerja sudah tersedia, tahap selanjutnya adalah implementasi. Implementasi sistem prosedur pengukuran kinerja ini berhubungan dengan teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Beberapa alternatif teknik atau pendekatan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Bapenda yaitu analisis anggaran dan *Balanced Scorecard* (BSC).
- m. Pelaporan hasil pengukuran kinerja
Pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah tahap pengukuran kinerja setelah analisis data yang berkaitan dengan kinerja selesai dilaksanakan.

Tujuan pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah menyajikan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi kinerja yang telah berhasil diukur dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pada periode berikutnya. Bentuk dan format laporan juga tergantung pada teknik dan pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Namun setidaknya item pokok yang harus ada dalam pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah:

- (1) Target/ rencana.
- (2) Kriteria (ukuran dan indikator kinerja).
- (3) Realisasi.
- (4) Penyimpangan realisasi terhadap target atau rencana yang ditetapkan.
- (5) Asumsi-asumsi pokok.

n. Monitoring, evaluasi, dan feedback

(1) Monitoring kinerja merupakan salah satu dari sejumlah alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah layanan dan program/kegiatan/sub kegiatan pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Monitoring kinerja dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah teknik atau cara melakukan segala sesuatu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dengan melakukan pengukuran dan monitoring kinerja Bapenda layanan publik diharapkan bisa digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja Bapenda. Pertanyaan mendasar dalam proses monitoring ini adalah bagaimana sumber daya digunakan dan apakah tindakan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien sudah dilakukan.

(2) Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana tujuan dan sasaran strategis. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik (*feedback*) atas hasil kinerja saat ini dan masa lalu sebagai dasar dan pelajaran untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

(3) Feedback

Feedback (umpan balik) merupakan upaya pembelajaran atas hasil pencapaian kinerja saat ini dan periode sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja di masa datang. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Triwulan II Tahun 2026 ini disusun dengan menggunakan kaidah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I PENDAHULUAN, diuraikan mengenai latar belakang, kerangka logis, tujuan, ruang lingkup, manfaat, metodologi pengukuran kinerja serta sistematika penulisan

BAB II METODOLOGI

Pada BAB II METODOLOGI, diuraikan mengenai metodologi dari pengukuran kinerja

BAB III MONITORING KINERJA

Pada BAB III MONITORING KINERJA, diuraikan mengenai monitoring pencapaian kinerja

BAB IV EVALUASI DAN TINDAKLANJUT KINERJA

Pada BAB IV EVALUASI DAN TINDAKLANJUT KINERJA, diuraikan evaluasi dan tindaklanjut dari hasil pengukuran kinerja

BAB V PENUTUP

Pada BAB V PENUTUP, diuraikan kesimpulan dari dokumen Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB)



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAB II

METODOLOGI

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Triwulan II Tahun 2026

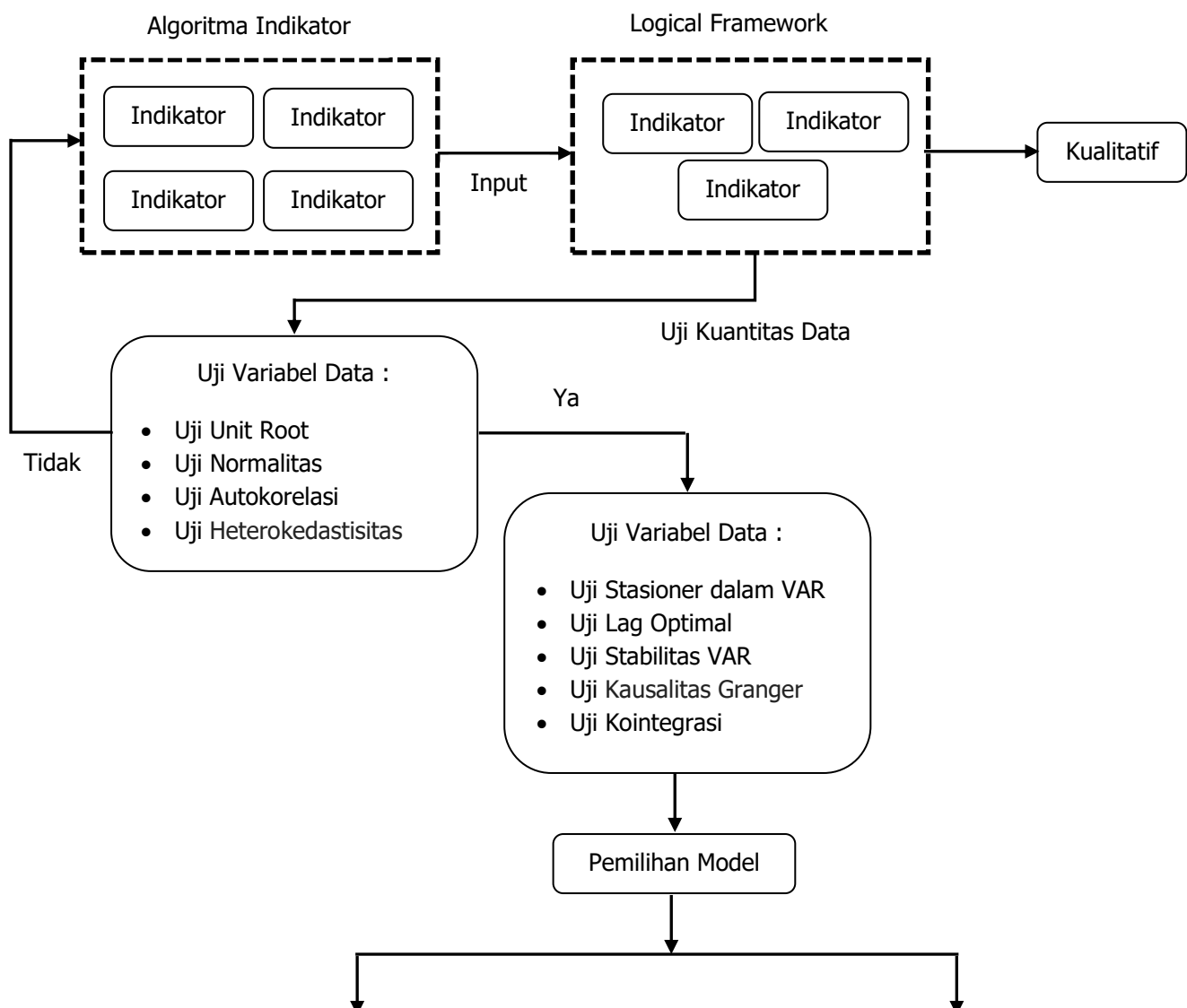


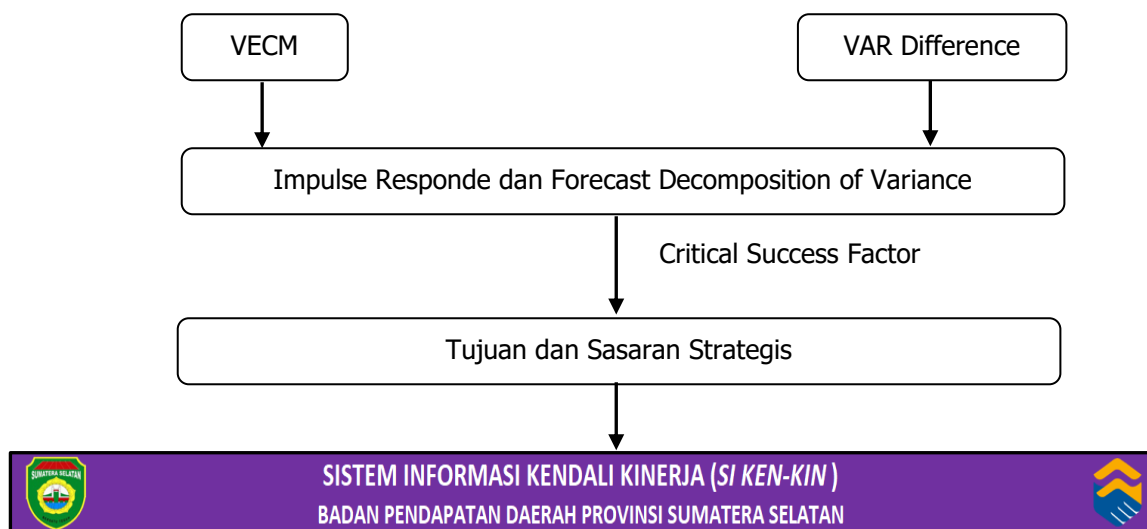
BAB II METODOLOGI



Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software eviews versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif





Gambar 2.1

Diagram Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

Tabel 2.1

Indeks Indikator Kinerja

INDEX	INDIKATOR				LEVEL		PEMILIK		
IKSS1	Deviasi Anggaran	Realisasi PAD	PAD Terhadap	Terhadap	Sasaran 1	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah				Sasaran 2	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS3	Pertumbuhan dalam APBD	pendapatan	daerah		Sasaran 3	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB				Sasaran 4	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS5	Persentase Daerah	PAD terhadap	Pendapatan		Sasaran 5	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS6	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi	Pencapaian		Sasaran 6	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS7	Persentase Rasio Non Migas	PAD Terhadap	PDRB		Sasaran 7	Strategis	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan

IKSS8	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran 8	Strategis	Kepala Badan Pendapatan Daerah
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Outcomes	Strategis Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Doleansi
IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas	Sasaran	Strategis	Kepala Subbag Keuangan

	Pertanggungjawaban Keuangan	Outcomes Level 2	
IKSSO21	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

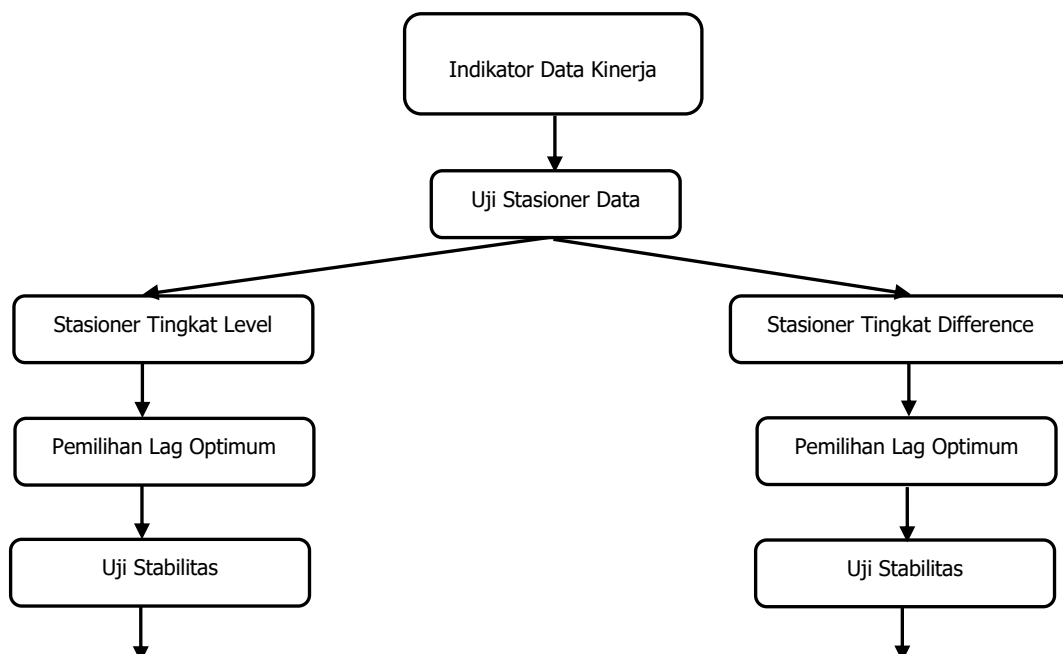
Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

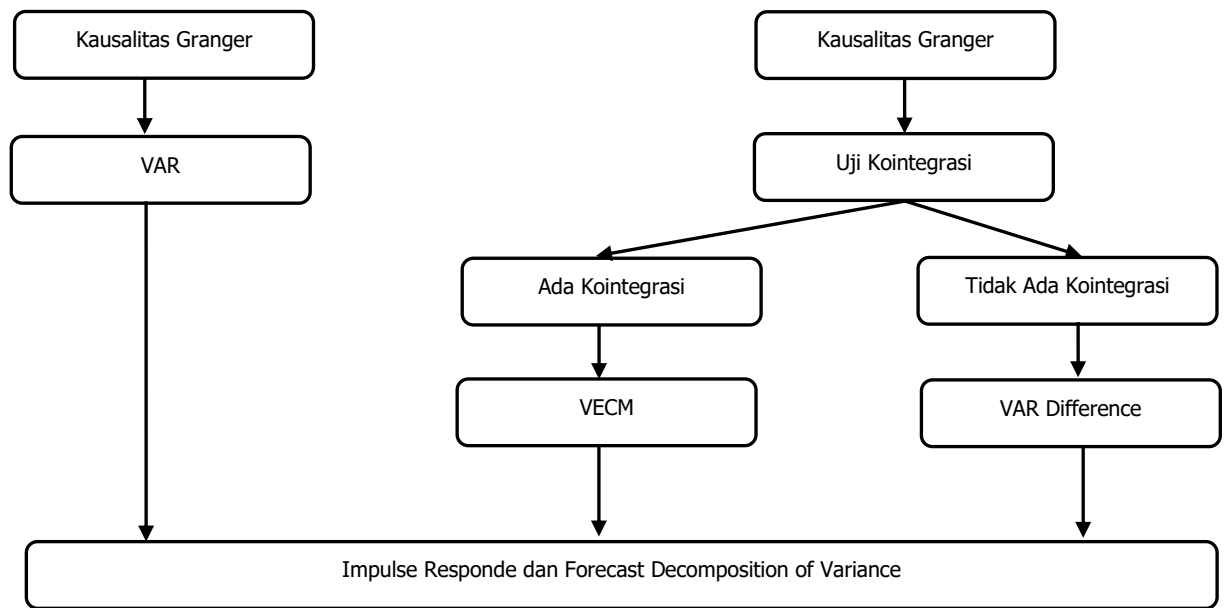
3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software eviews versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut:





Gambar 2.2

Diagram Tahapan Pemilihan Model

Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
- Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut:

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana: Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter ρ , identik dalam deret waktu (yaitu, ρ , ρ untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $\rho = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $\rho < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi ρ_i menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $\rho_i = 0$ terhadap hipotesis alternatif $\rho_i < 0$, ($t=1, \dots, t$); $\rho_i = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural ($\ln$).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang

baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$x_t = A_1 x_{t-p} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana: x , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut:

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

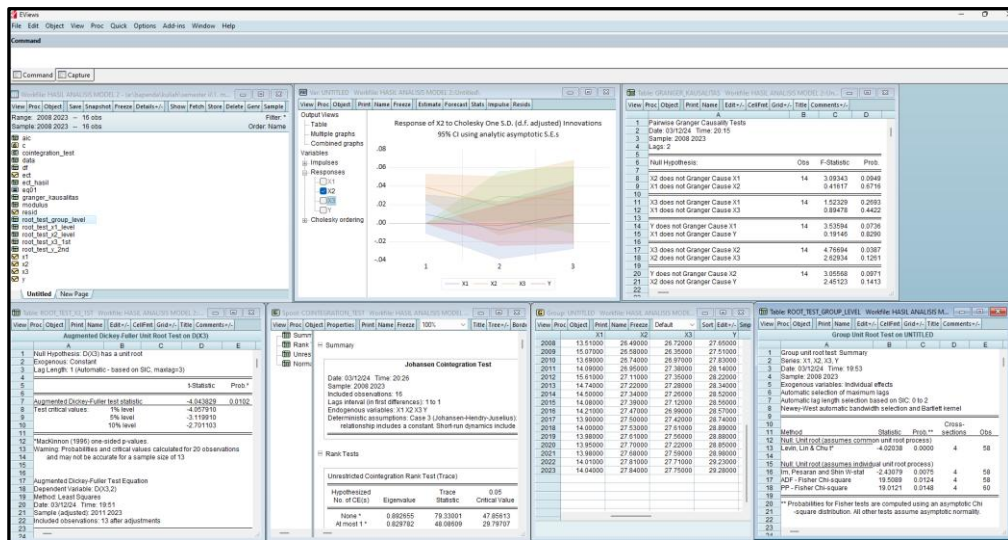
$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

Dimana t adalah periode waktu ($t = 1, \dots, t$); l lag dari setiap variabel data; $\ln IKSS$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; $\ln IKSSO$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan $IKSSO$ Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

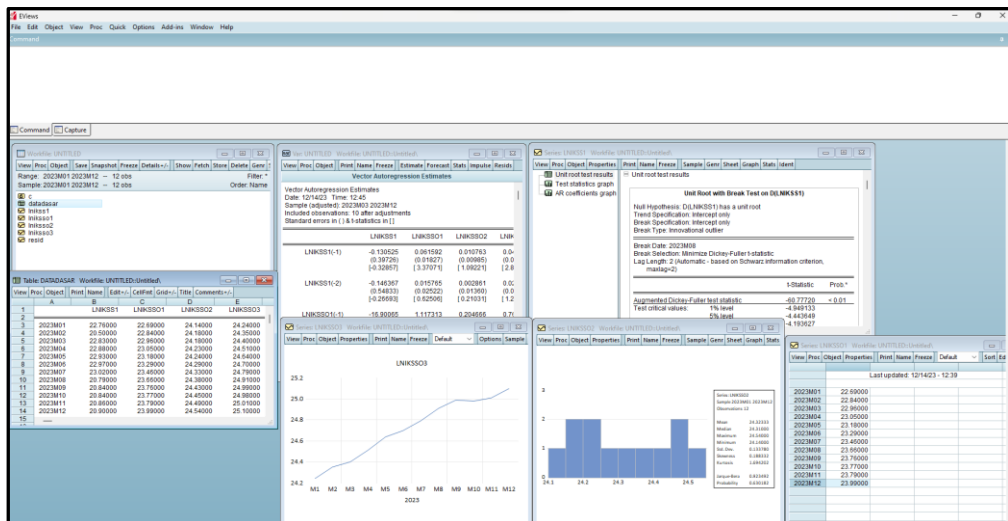
Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara $IKSS$ dan $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya $\gamma_{1t} = 0$ (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara $IKSS$, $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 dan Y tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software *eviews* versi 13 sebagai berikut:



Gambar 2.3
Tampilan Awal views versi 13



Gambar 2.4
Tampilan Running Data

Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Hasil Uji Unit Root Test

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnIKSS7)$	-7.081123	-3.451682	-3.724587	-2.261899	0.0001
$\Delta (lnIKSS8)$	-7.050415	-3.620184	-2.076314	-2.810604	0.0018
$\Delta (lnIKSS01)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta (lnIKSS02)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta (lnIKSS03)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta (lnIKSS04)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnIKSS05)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnIKSS06)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnIKSS07)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnIKSS08)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnIKSS09)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnIKSS010)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnIKSS011)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnIKSS012)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS013)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnIKSS014)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnIKSS015)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnIKSS016)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS017)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnIKSS018)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnIKSS019)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnIKSS020)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnIKSS021)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta (lnIKSS022)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042

$\Delta (\ln IKSS023)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (\ln IKSS024)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (\ln IKSS025)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (\ln IKSS026)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (\ln IKSS027)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

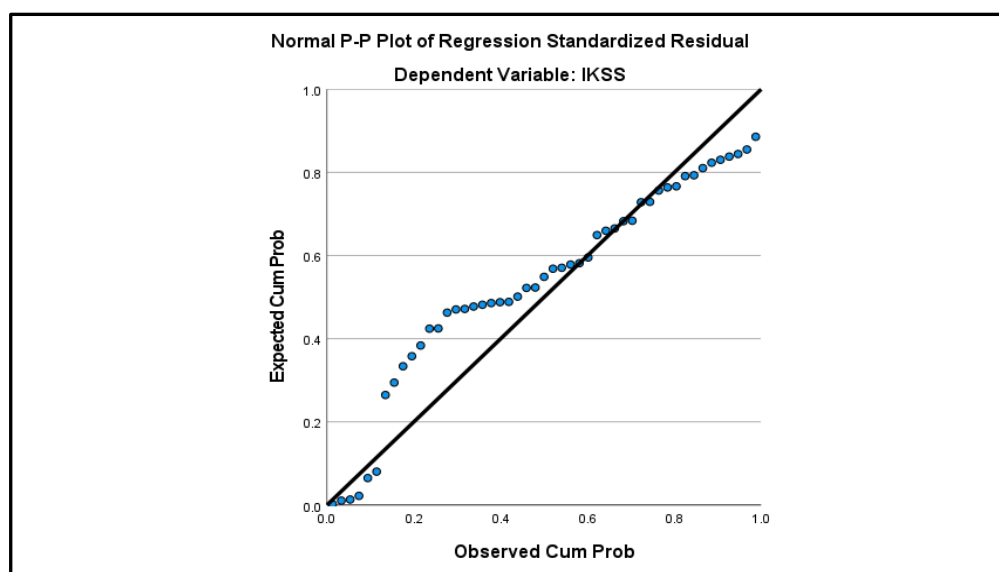
Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Null Hypothesis : $\Delta(\ln IKSS)$; $\Delta(\ln IKSS0 \text{ Level } 1)$; $\Delta(\ln IKSS0 \text{ Level } 2)$ has a unit root

Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)

*MacKinnon (1996) one-sided p-values

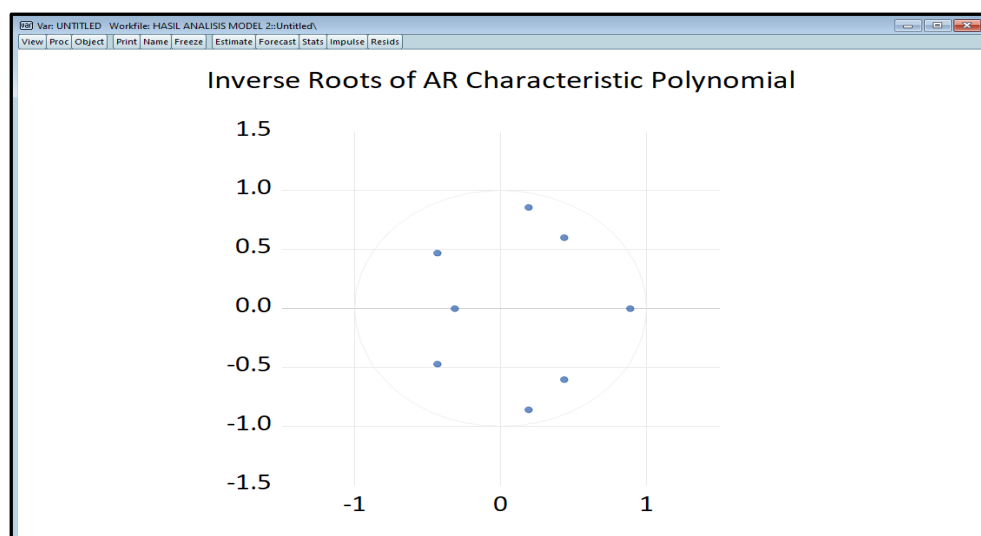
Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut $\ln IKSS$; $\ln IKSS0 \text{ Level } 1$; $\ln IKSS0 \text{ Level } 2$; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Gambar 2.5

Distribusi Variabel

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Gambar 2.6

Polinomial Variabel

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukkan bahwa penentuan panjang pada lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 33 (tiga puluh tiga) variabel data yang diuji.

Tabel 2.3

Pemilihan Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	33.97103	NA*	1.17e-07	-4.610928	-4.437098*	-4.646658
1	43.93606	12.26465	3.49e-07	-3.682471	-2.813318	-3.861121
2	74.52859	18.82617	1.13e-07*	-5.927475*	-4.363000	-6.249046*

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

*indicate lag order selected by the criterion

AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |5.927475|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Tabel 2.4

Parameter Akaike Information Criterion (AIC)

Optimum Lag	$\Delta (\ln KSS)$	$\Delta (\ln KSS01)$	$\Delta (\ln KSS02)$	$\Delta (\ln KSS03)$	$\Delta (\ln KSS04)$	Joint
Δ Lag one	2.561499 [0.7672]***	4.752189 [0.4469]**	1.749800 [0.8826]	14.90229 [0.0108]***	2.404408 [0.7908]	26.20479 [0.3967]
Δ Lag two	4.661034 [0.4586]	1.807226 [0.8751]	3.341873 [0.6474]**	2.993611 [0.7010]	114.9873 [0.0000]***	157.2580 [0.0000]
df	5	5	5	5	5	25

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion

Significant level ***1%, **5% and *10%

Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Tabel 2.5

Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Trace Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.892655	79.33001	47.85613	0.0000
At most 1*	0.829782	48.08609	29.79707	0.0002
At most 2*	0.723839	23.29663	15.49471	0.0027
At most 3*	0.314272	5.281836	3.841465	0.0215
Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.892655	31.24392	27.58434	0.0162
At most 1	0.829782	24.78946	21.13162	0.0146

At most 2	0.723839	18.01479	14.26460	0.0122
At most 3	0.314272	5.281836	3.841465	0.0215

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS,2) &= 0.357687854138 * D(lnIKSS(-1),2) + 0.255696325482 * D(lnIKSSO1(-1),2) \\
 &+ 0.363554788223 * D(lnIKSSO2(-1),2) + 0.222569874236 * D(lnIKSSO3(-1),2) \\
 &+ 0.555889632566 * D(lnIKSSO4(-1),2) + 0.666889566336 * D(lnIKSSO5(-1),2) \\
 &+ 0.110225577956 * D(lnIKSSO6(-1),2) + 0.330000561142 \\
 &* D(lnIKSSO7(-1),2)
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO1,2) &= 1.6134766894 * D(lnIKSSO8(-1),2) + 0.618968722732 \\
 &* D(lnIKSSO9(-2),2) + 0.185263624107 \\
 &* D(lnIKSSO10(-1),2)
 \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO2,2) &= 0.61326312845 * D(lnIKSSO11(-1),2) + 0.340396781481 \\
 &* D(lnIKSSO12(-2),2) + 0.116692533601 \\
 &* D(lnIKSSO13(-1),2)
 \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO3,2) &= 1.07193559441 * D(lnIKSSO14(-1),2) + 0.5599794065846 \\
 &* D(lnIKSSO15(-2),2) + 0.500636698415 \\
 &* D(lnIKSSO16(-1),2)
 \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO4,2) &= 0.420313895269 * D(lnIKSSO17(-1),2) + 0.200233652213 \\
 &* D(lnIKSSO18(-1),2) + 0.339965221000 \\
 &* D(lnIKSSO19(-1),2)
 \end{aligned} \tag{15}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO5,2) &= 0.604814176085 * D(lnIKSSO20(-1),2) + 0.66800500123622 \\
 &* D(lnIKSSO21(-1),2) + 0.558999622300 \\
 &* D(lnIKSSO22(-1),2)
 \end{aligned} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO6,2) &= 0.460615311019 * D(lnIKSSO23(-1),2) + 0.004125563678 \\
 &* D(lnIKSSO24(-1),2) + 0.445012300622 \\
 &* D(lnIKSSO25(-1),2)
 \end{aligned} \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSSO7,2) &= 0.00731308357823 * D(lnIKSSO27(-1),2) + 0.008852003166 \\
 &* D(lnIKSSO27(-1),2)
 \end{aligned} \tag{18}$$

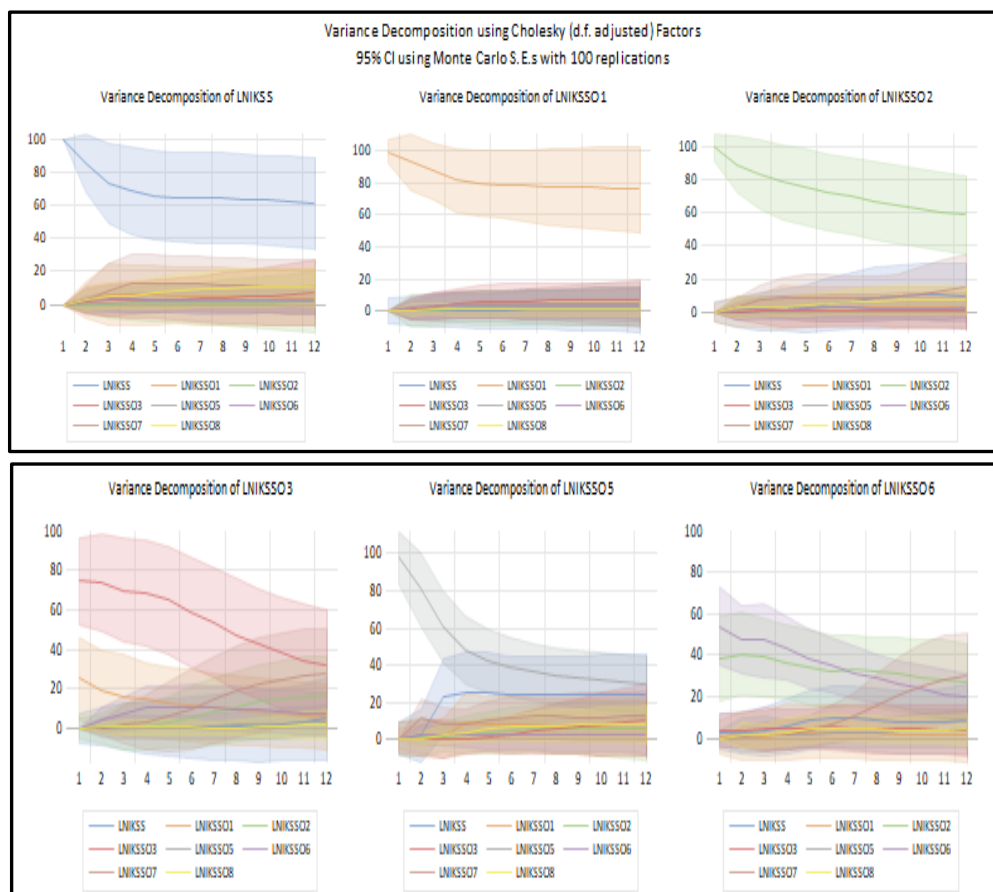
Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan

panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Hasil Estimasi VEC Model

Dependent Variabel	C	$\Delta (\ln IKSS1_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS2_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS3_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS4_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (\ln IKSS01)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R ² : 0.8557 Adj. R ² : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (\ln IKSS02)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R ² : 0.8663 Adj. R ² : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (\ln IKSS03)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R ² : 0.9063 Adj. R ² : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (\ln IKSS04)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R ² : 0.8264 Adj. R ² : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (\ln IKSS05)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R ² : 0.9380 Adj. R ² : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel





Gambar 2.7

Variance Decomposition

6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.7
Kontribusi Kinerja IKSSO Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	05.57	09.23	04.21	11.26	08.25	06.33
$\Delta (lnIKSS02)$	09.78	08.33	03.33	06.30	13.65	12.56
$\Delta (lnIKSS03)$	07.26	02.63	10.64	16.26	09.63	04.13
$\Delta (lnIKSS04)$	17.56	08.02	11.71	02.64	01.24	03.36
$\Delta (lnIKSS05)$	06.98	11.81	14.16	08.80	13.80	04.54
$\Delta (lnIKSS06)$	12.40	03.92	08.25	01.52	09.66	12.46
$\Delta (lnIKSS07)$	16.00	12.20	08.32	05.85	02.55	09.12

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.8
Kontribusi Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	06.39	05.16	03.13	07.23	08.89	05.63	01.25
$\Delta (lnIKSS09)$	11.34	07.72	04.17	04.21	04.23	04.58	02.15
$\Delta (lnIKSS010)$	07.76	04.45	06.09	06.61	05.18	03.69	09.34
$\Delta (lnIKSS011)$	02.15	05.19	10.23	07.17	04.14	06.66	03.34
$\Delta (lnIKSS012)$	06.14	05.89	07.53	04.56	02.30	08.11	04.41
$\Delta (lnIKSS013)$	05.13	08.52	06.86	05.05	06.12	09.10	06.61
$\Delta (lnIKSS014)$	05.16	02.12	08.85	07.16	07.78	13.39	14.51
$\Delta (lnIKSS015)$	08.26	04.56	01.23	02.67	07.19	06.25	07.32
$\Delta (lnIKSS016)$	03.33	12.25	02.23	07.19	07.61	04.48	01.24
$\Delta (lnIKSS017)$	00.13	03.66	06.71	01.36	10.83	09.83	04.45
$\Delta (lnIKSS018)$	02.48	01.59	05.82	08.30	10.11	03.43	05.52
$\Delta (lnIKSS019)$	09.56	08.13	06.19	07.35	07.77	05.51	06.63

$\Delta (lnIKSS020)$	08.25	08.12	05.26	01.46	01.32	08.56	07.73
$\Delta (lnIKSS021)$	04.84	02.36	09.13	03.66	08.79	01.25	05.26
$\Delta (lnIKSS022)$	06.63	09.23	00.45	07.55	05.38	06.99	07.78
$\Delta (lnIKSS023)$	07.21	02.00	02.33	04.41	05.63	03.24	04.20
$\Delta (lnIKSS024)$	04.32	01.63	04.12	05.56	04.48	04.99	09.65
$\Delta (lnIKSS025)$	04.15	07.14	05.63	05.67	03.34	04.77	08.78
$\Delta (lnIKSS026)$	08.22	06.67	04.41	07.72	01.23	05.55	01.79
$\Delta (lnIKSS027)$	01.26	04.34	05.57	06.62	04.41	09.62	02.60

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

Tabel 2.9

Hubungan Cross Cutting Kinerja IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	10.43	09.77	15.79	18.74	12.75	13.67
$\Delta (lnIKSS02)$	10.22	13.27	12.67	13.70	16.85	17.44
$\Delta (lnIKSS03)$	12.17	17.87	10.36	13.14	19.37	15.87
$\Delta (lnIKSS04)$	12.44	19.71	18.29	17.16	13.16	16.64
$\Delta (lnIKSS05)$	13.02	16.19	15.64	11.20	16.20	15.46
$\Delta (lnIKSS06)$	17.26	15.08	13.75	18.48	19.34	13.54
$\Delta (lnIKSS07)$	14.00	15.80	12.68	13.15	17.15	19.88

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

Tabel 2.10

Hubungan Cross Cutting Kinerja IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSSO1)$	$\Delta (lnIKSSO2)$	$\Delta (lnIKSSO3)$	$\Delta (lnIKSSO4)$	$\Delta (lnIKSSO5)$	$\Delta (lnIKSSO6)$	$\Delta (lnIKSSO7)$
$\Delta (lnIKSSO8)$	13.71	10.81	12.11	12.57	11.23	17.83	18.75
$\Delta (lnIKSSO9)$	18.16	12.32	13.43	15.17	12.12	13.44	17.85
$\Delta (lnIKSSO10)$	12.24	11.12	12.48	13.40	10.92	15.01	19.66
$\Delta (lnIKSSO11)$	13.04	14.81	12.34	13.24	11.34	15.06	12.36
$\Delta (lnIKSSO12)$	14.05	14.23	12.83	12.67	12.45	13.40	16.26
$\Delta (lnIKSSO13)$	14.56	11.48	11.10	11.72	12.46	15.63	15.33
$\Delta (lnIKSSO14)$	14.84	17.88	11.15	10.84	12.22	16.61	15.49
$\Delta (lnIKSSO15)$	19.74	15.44	13.77	11.33	12.81	13.75	12.68
$\Delta (lnIKSSO16)$	16.67	13.75	17.77	12.81	17.39	14.52	18.76
$\Delta (lnIKSSO17)$	10.87	16.34	15.05	14.64	12.23	13.33	14.56
$\Delta (lnIKSSO18)$	19.52	11.41	14.67	12.70	14.52	12.44	13.25
$\Delta (lnIKSSO19)$	11.44	12.87	13.37	16.65	13.26	11.52	15.15
$\Delta (lnIKSSO20)$	12.75	11.88	14.74	18.54	18.68	11.44	20.27
$\Delta (lnIKSSO21)$	15.16	16.64	10.87	16.34	11.21	18.75	24.74
$\Delta (lnIKSSO22)$	13.37	19.77	11.55	12.45	14.62	11.01	21.22
$\Delta (lnIKSSO23)$	12.79	12.00	12.23	13.26	14.33	26.76	15.80
$\Delta (lnIKSSO24)$	14.68	13.37	13.36	14.56	16.95	15.01	10.35
$\Delta (lnIKSSO25)$	15.85	12.86	14.25	16.23	12.99	15.23	11.22
$\Delta (lnIKSSO26)$	11.78	11.26	17.22	11.12	13.59	12.75	18.21
$\Delta (lnIKSSO27)$	18.74	15.63	16.62	13.13	14.55	16.36	17.40

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)

7. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

NO.

KENDALI
KINERJA

SISTEM INFORMASI

1.	Kepala Badan	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023 CAPAIAN % IKSS 1 97,91 % IKSS 2 97,44 % IKSS 3 96,00 % IKSS 4 99,24 % IKSS 5 99,05 % IKSS 6 98,34 REALISASI IKSS 2 REALISASI IKSS 3 REALISASI IKSS 4 REALISASI IKSS 5 REALISASI IKSS 6 REALISASI IKSS 1
2.	Bidang Pajak	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023 CAPAIAN % IKSS 1 94,17 % IKSS 8 94,81 % IKSS 9 97,17 % IKSS 10 93,64 REALISASI IKSS 1 REALISASI IKSS 8 REALISASI IKSS 9 REALISASI IKSS 10 Meningkatnya Realisasi Penyerapan Pajak Terhadap GDP
3.	Bidang PDLL	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 2023 CAPAIAN % IKSS 2 93,61 % IKSS 11 97,14 % IKSS 12 94,55 % IKSS 13 92,61 REALISASI IKSS 2 REALISASI IKSS 11 REALISASI IKSS 12 REALISASI IKSS 13 Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penyerapan Lain-lain Dalam APBD

4.	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 2023 Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah Capaian: % KSSO 3: 100,00, % KSSO 14: 93,27, % KSSO 15: 95,28, % KSSO 16: 94,26 REALISASI KSSO 15: 17,15, 15,06, 15,06, 11,32, 11,06, 10,56, 7,89, 5,89, 5,532, 4,16, 2,222, 1,136 REALISASI KSSO 14: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 REALISASI KSSO 3: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 KSSO 3: Level Maturitas Pengendalian Intern (0-5) KSSO 14: Persentase Berkurangnya Intensitas Pemeriksaan KSSO 15: Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian KSSO 16: Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif
5.	Bidang P2PATDA	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPALA BIDANG PENGALIHAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN 2023 Meningkatnya Pengalihan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah Capaian: % KSSO 4: 94,68, % KSSO 17: 99,42, % KSSO 18: 94,80, % KSSO 19: 93,31 REALISASI KSSO 4: 75,50, 66,70, 60,60, 57,70, 54,20, 49,20, 45,70, 42,70, 39,70, 36,70, 33,70, 30,70, 27,70, 24,70, 21,70, 18,70, 15,70, 12,70, 9,70, 6,70, 3,70, 0,70 REALISASI KSSO 17: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 REALISASI KSSO 18: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 REALISASI KSSO 19: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 KSSO 4: Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah KSSO 17: Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah KSSO 18: Persentase Meningkatnya Kerjasama KSSO 19: Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi
6.	Sekretariat	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT 2023 Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian: % KSSO 5: 92,82, % KSSO 20: 100,00, % KSSO 21: 93,53 REALISASI KSSO 5: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 REALISASI KSSO 20: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 REALISASI KSSO 21: 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0 KSSO 5: Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah KSSO 20: Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan KSSO 21: Persentase Efisien dan Efektif Penggunaan Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAB III

MONITORING KINERJA

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Triwulan II Tahun 2026



A. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Bapenda dalam dokumen KITAB ini meliputi beberapa aspek-aspek pengukuran pencapaian antara lain:

- a) Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b) Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c) Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
- d) Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e) Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f) Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Selama periode Triwulan II (April, Mei dan Juni) tahun 2026, kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Realisasi Kinerja Unit Eselon II

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	REALISASI			
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	1,01	2,200	217,82	Kepala Badan	
			2,02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	510.000.000					
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	84,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	21,00	19,67	93,67	Kepala Badan	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,458	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.500.000	0,23	0,590	256,52	Kabid P2PATDA	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,28	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	120.800.000	0,64	(17,19)	(2.685,78)	Kepala Bidang PDLL	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,252	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.106.800.000	0,62	0,341	55,00	Kepala Bidang Pajak	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,89	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	25,02	58,996	235,795	Kepala Bidang Wasbin	



7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli		92,21	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	25,00	41,302	165,208	Kepala Bidang Pajak	
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000				Kepala Bidang Pajak	
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		6,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	2,5	58,698	2.347,92	Kepala Bidang P2PATDA	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	9.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,98	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	0,4	0,256	64,00	Kepala Bidang PDLL	
		9.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,18	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	342.700.000	0,12	0,355	295,83	Kepala Bidang Pajak	

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)



Tabel 3.2

Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	KINERJA TRIWULAN II		RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	KEGIATAN TRIWULAN II	
					TARGET	REALISASI						TARGET	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02	1,01	2,200	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Sinergi optimalisasi pendapatan bersama dengan Pansus DPRD Prov. Sumsel	1.288.886.060	6 bulan	Seluruh Bidang	10,00	2,58
								Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	546.003.720	17 Kab/Kota	Seluruh Bidang	25,00	0,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Bapenda	Nilai	84,07	10,00	12,03	Penugasan kinerja sampai ke level staf pelaksana (<i>cascading</i>)	Evaluasi dan pemantauan kinerja secara berkala waktu	72.600.000	4 kali	Seluruh Bidang	25,00	20,87
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,458	0,23	0,590	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Sinergi dan kolaborasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB	98.500.000	17 Kab/Kota	Bidang P2PATDA	50,00	43,85
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	%	1,28	0,64	(17,19)	Sinergi dan koordinasi pendapatan transfer pusat	Konsolidasi fiskal dengan pemerintah pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15,00	8,54



5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	1,252	0,62	0,341	Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.106.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,51	25,02	58,996	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Optimalisasi objek retribusi daerah	144.000.000	2 semester	Bidang Wasbin	10,00	9,27
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,21	25,00	41,302	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	102.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20,00	4,68
							Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.036.800.000	8 kali	Bidang Pajak	10,00	2,44
							Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	454.000.000	2 kali	Bidang Pajak	25,00	26,16
8.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	6,00	2,5	58,698	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	546.003.720	1 kali	Bidang P2PATDA	15,00	0,00
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD	9.1 Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB	%	0,98	0,4	0,256	Diversifikasi penerimaan	Masih terdapatnya tunggakan	548.800.000	1 kali	Bidang Pajak	25,00	11,18



	Terhadap PDRB		Non Migas					pajak daerah	penerimaan pajak daerah					
		9.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,18	0,12	0,355	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	342.700.000	2 kali	Bidang Pajak	10,00	1,31

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)



Tabel 3.3

Capaian Realisasi Kinerja Unit Eselon III dan IV

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ RINCIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN II		CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	REALISASI			
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	1,73	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.036.800.000	0,73	0,62	84,93	Bidang Pajak	
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	14,81	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	454.000.000	7,53	6,26	83,13	Bidang Pajak	
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	5,02	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.228.886.060	2,02	1,96	97,03	Bidang Pajak	
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	100	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	umlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	40.000.000	50,00	41,06	82,12	Bidang Pajak	
5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	95,43	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.400.000	43,00	38,12	88,65	Bidang PDLL	
6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	89,78	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	144.000.000	50,00	43,06	86,12	Bidang PDLL	



7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	83,93	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	120.800.000	45,00	39,84	88,53	Bidang PDLL	
8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	84,83	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	102.000.000	38,72	35,16	90,80	Bidang PDLL	
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	186.600.000	3	0,00	0,00	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,91	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	46,26	43,21	93,41	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	16,85	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	20.000.000	8,23	7,12	86,51	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	
13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	82,19	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	548.800.000	31,06	29,64	95,43	Bidang P2PATDA	



14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah		83,81	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	33,21	29,21	87,95	Bidang P2PATDA	
15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama		93,62	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	30,00	23,61	78,70	Bidang P2PATDA	
16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi		100,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	342.700.000	50,00	44,18	88,36	Bidang P2PATDA	
17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	17.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	94,96	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	120.000.000	41,56	38,17	91,84	Sekretariat	
		17.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4,92	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000	1,00	0,00	0,00	Sekretariat	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	73.000.000	1,00	1,00	100,00	Sekretariat	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000	1,00	1,00	100,00	Sekretariat	



		17.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	80,92	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	243.500.000	31,62	28,06	88,74	Sekretariat	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	372.800.000	27,83	25,00	89,83	Sekretariat	
					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	293.200.000	25,00	20,00	80,00	Sekretariat	
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi		62,67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama		91,54	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	342.700.000	40,00	32,16	80,40	UPTB Puslia	
20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi		79,21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi		41,78	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs		100	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.771.400.000	35,63	33,71	94,61	UPTB Puslia	



23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	100	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	546.003.720	50,00	39,42	78,84	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
24.	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak	8,62	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	1.422.980.200	3,72	0,00	0,00	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	
25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	9,60	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70.000.000	4,14	2,15	51,93	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)



Tabel 3.4

Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Unit Eselon III/IV

NO.	SASARAN STRATEGIS LEVEL INTERMEDIATE OUTCOMES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	KINERJA TRIWULAN II		RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	KEGIATAN TRIWULAN II	
					TARGET	REALISASI						TARGET	REALISASI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,73	0,73	0,62	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Minimnya sarana prasarana media penyampaian diseminasi pajak daerah	2.036.800.000	4 kali	Bidang Pajak	10,00	0,00
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,81	7,53	6,26	Penetapan wajib pajak daerah	Masih terdapatnya objek wajib pajak baru yang belum ditetapkan	454.000.000	1 kali	Bidang Pajak	5,00	0,00
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,02	2,02	1,96	Penagihan pajak daerah	Masih terdapatnya pengajuan doleansi pajak daerah	1.228.886.060	2 kali	Bidang Pajak	15,00	0,00
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	50,00	41,06	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan dalam pembukuan dan pelaporan pajak daerah	40.000.000	4 kali	Bidang Pajak	25,00	0,00
5.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,43	43,00	38,12	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya potensi retribusi yang belum digali untuk peningkatan PAD	42.400.000	2 kali	Bidang PDLL	5,00	0,00



6.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,78	50,00	43,06	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kerjasama pemanfaatan terhadap objek retribusi masih belum optimal	144.000.000	1 kali	Bidang PDLL	10,00	0,00
7.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,93	45,00	39,84	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pola intensifikasi belum optimal terhadap penerimaan pusat	120.800.000	4 kali	Bidang PDLL	15,00	0,00
8.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,83	38,72	35,16	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Belum optimalnya penerimaan hibah	102.000.000	4 kali	Bidang PDLL	20,00	0,00
9.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	3	0,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerapan pengendalian intern pemerintah	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15,00	0,00
10.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,91	46,26	43,21	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5,00	0,00
11.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	16,85	8,23	7,12	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran dalam pendapatan daerah	20.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5,00	0,00



12.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,74	3,74	0,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Masih terdapatnya pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan SOP	186.600.000	4 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15,00	0,00
13.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	82,19	31,06	29,64	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada kemampuan dan kapasitas daerah	548.800.000	1 kali	Bidang P2PATDA	5,00	0,00
14.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,81	33,21	29,21	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penelitian berbasis atas daya dukung daerah belum optimal	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	10,00	0,00
15.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,62	30,00	23,61	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Belum optimalnya penggalan sumber retribusi baru bagi daerah	342.700.000	4 kali	Bidang P2PATDA	5,00	0,00
16.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100,00	50,00	44,18	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kebijakan yang belum diharmonisasi terkait dengan kebijakan investasi daerah	342.700.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15,00	0,00



17.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,96	41,56	38,17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Masih terdapatnya jurnal koreksi atas pertanggungjawaban keuangan	120.000.000	4 kali	Sekretariat	10,00	0,00
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	4,92	1,00	0,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masih terdapatnya GAP antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15,00	0,00
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara berkala	72.600.000	4 kali	Sekretariat	15,00	0,00
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja anggaran terhadap sasaran strategis belum optimal	73.000.000	2 kali	Sekretariat	15,00	0,00
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,92	5,00	2,34	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas ASN belum optimal	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masih minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kinerja ASN	372.800.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00



							Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan capacity building bagi pegawai terhadap peraturan terkait kinerja ASN	293.200.000	4 kali	Sekretariat	20,00	0,00
18.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,67	35,63	33,71	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masih rendahnya penggunaan digitalisasi dalam SPBE	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	15,00	0,00
19.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,54	40,00	32,16	Meningkatnya modern channel	Belum optimalnya kerjasama layanan e commerce pada pembayaran pajak	342.700.000	1 kali	UPTB Puslia	10,00	0,00
20.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	79,21	35,63	33,71	Pengembangan digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah	Belum optimalnya layanan berbasis digitalisasi	7.771.400.000	1 kali	UPTB Puslia	10,00	0,00
21.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,78	35,63	33,71	Pemeliharaan asset tak berwujud	Masih rendahnya tingkat keamanan system informasi basis pajak daerah	7.771.400.000	2 kali	UPTB Puslia	15,00	0,00
22.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	35,63	33,71	Peningkatan akses internet pada blank spot area	Masih terdapatnya blank spot area	7.771.400.000	4 kali	UPTB Puslia	20,00	0,00
23.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	50,00	39,42	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	546.003.720	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10,00	0,00



24.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,62	3,72	0,00	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggakan dalam pembayaran pajak daerah	1.422.980.200	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20,00	0,00
25.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,60	4,14	2,15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NJKB	70.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15,00	0,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel (2026)







PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAB IV

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KINERJA

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Triwulan II Tahun 2026



BAB IV EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KINERJA

A. Kualitas Atas Capaian Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya

Atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu Triwulan II (April – Mei – Juni) tahun 2026 terus menunjukkan trend kenaikan yang positif karena berbagai terobosan atau upaya yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah:

- 1) Sinergi dan kolaborasi bersama dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk optimalisasi pendapatan daerah;
- 2) Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan berkaitan dengan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB;
- 3) Melakukan pendataan dan validasi kendaraan bermotor bersama dengan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan melalui pelaksanaan *home interview survey*;
- 4) Peningkatan tata kelola pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- 5) Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
- 6) Penempelan stiker tanda lunas di kendaran bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak dengan melakukan;

- 7) Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan;
- 8) Membangun kerjasama dengan e-commerce lainnya, antara lain indomaret, alfamart, bli bli com dan tokopedia.
- 9) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap;
- 10) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pemungutan pendapatan daerah secara bertahap terutama untuk UPTB baru;
- 11) Terus membangun sinergitas dengan mitra kerja:
 - ✓ Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - ✓ Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan;
 - ✓ Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah;
 - ✓ Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan;
 - ✓ Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data;
 - ✓ Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan.
- 12) Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin;
- 13) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menuju pelayanan prima melalui inovasi-inovasi pelayanan yang dilakukan masing-masing UPTB;
- 14) Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

- 15) Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya;
- 16) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 17) Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;
- 18) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru;
- 19) Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern;
- 20) Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel;
- 21) Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan;
- 22) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), antara lain:
 - Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
 - Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif;
 - Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom

penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

- Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan.

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

c. Bagian Penerimaan Hasil Laba BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.

d. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam menggali pendapatan asli daerah.

e. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Efisiensi Sumber Daya Yang Digunakan Dalam Mencapai Kinerja

1. Analisis Sumber Daya Manusia

- a). Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk pegawai UPTB Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan per Desember 2022 berjumlah 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) orang pegawai, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) orang Golongan IV, 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang Golongan III dan 20 (dua puluh) orang Golongan II;
- b). Ditinjau dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah cukup memadai dan telah mampu mengakomodir kebutuhan badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari segi kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah pegawai Bapenda yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang ada;

- c). Untuk menunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah, terlampir disajikan kondisi eksisting serta kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir.

2. Analisa Sumber Daya Aset

- a) Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 16 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB;
- b) Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru yang resmi beroperasi pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas diisi pada seluruh UPTB dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalokasikan pembangunan 2 unit kantor UPTB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan akan dianggarkan seterusnya secara bertahap untuk kedepannya;
- c) Sampai dengan saat ini Badan Pendapatan Daerah telah memiliki lebih dari 60 titik layanan pajak yang berupa : UPTB, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive thru, yang tersebar di 17 Kab/Kota;
- d) Mobile Samsat, Badan pendapatan daerah memiliki unit pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki

sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak;

- e) Samsat Drive Thru, pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini sudah beroperasi 3 (tiga) samsat Drive Thru dan kedepan akan diperluas secara bertahap;
- f) Samsat Mall, merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu: PTC Mall, PIM, PS Mall dan di Lubuklinggau;
- g) Samsat Corner, salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan;
- h) Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Terkait informasi keuangan, berikut disajikan efisiensi anggaran yang kurang mendukung target dan capaian kinerja berdasarkan *cascading* pohon kinerja sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU [Rp.]		EFISIENSI [Rp.]
		Sebelum	Setelah	
1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	50.000.000	25.000.000	25.000.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.500.000.000	2.400.000.000	100.000.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000.000	8.862.500.000	3.137.500.000
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.900.000.000	1.826.944.847	6.073.055.153
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.500.000.000	1.140.000.000	360.000.000
6.	Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000	410.000.000	590.000.000
7.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.000.000	50.000.000	50.000.000
8.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.000.000.000	890.000.000	1.110.000.000
JUMLAH EFISIENSI				11.445.555.153

C. Hambatan

Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2020, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 91,31% sedangkan non

pajak hanya berkontribusi 8,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan teknologi selakannya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan

Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.

1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.

1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan

Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.

1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.

1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

2. Permasalahan Eksternal

2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2025, hanya 8 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target (>100%) dan 7 Perangkat Daerah lainnya tidak mencapai target (<100%). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 9.313.749.306,- (122,52%) dari target sebesar Rp. 7.601.707.223,-

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

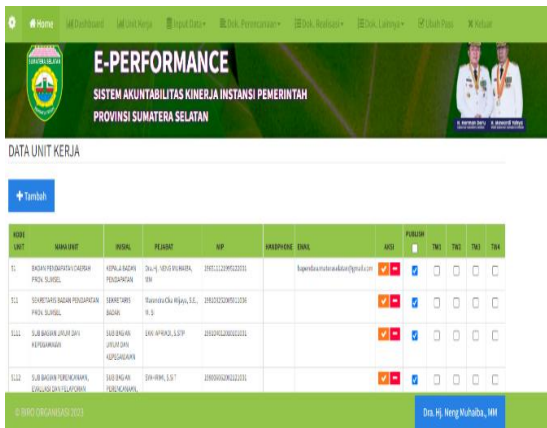
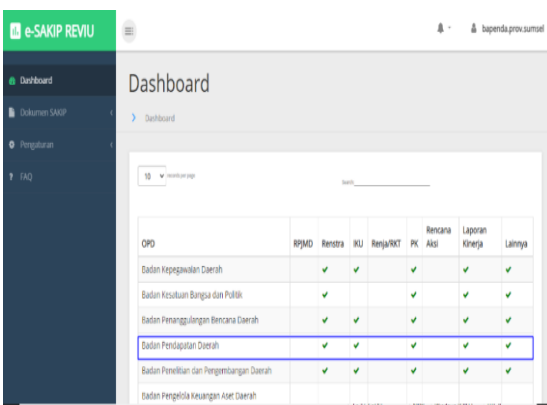
2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

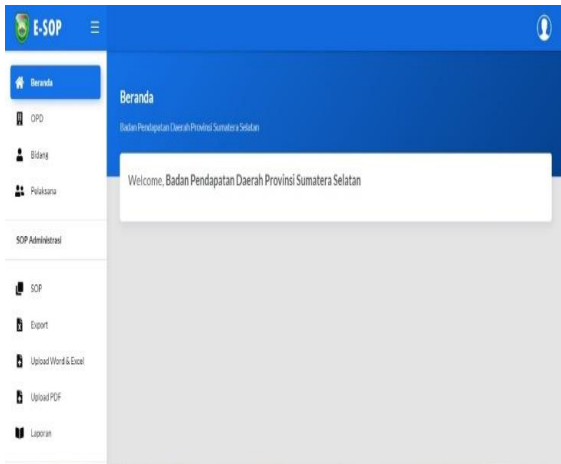
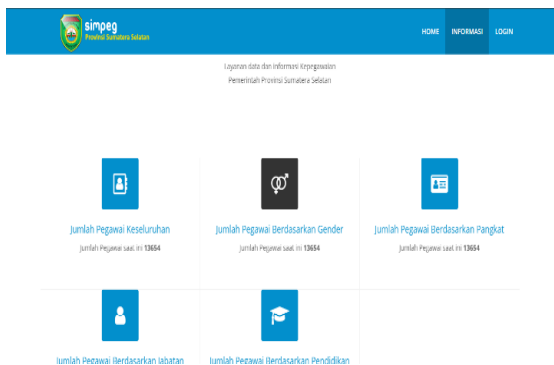
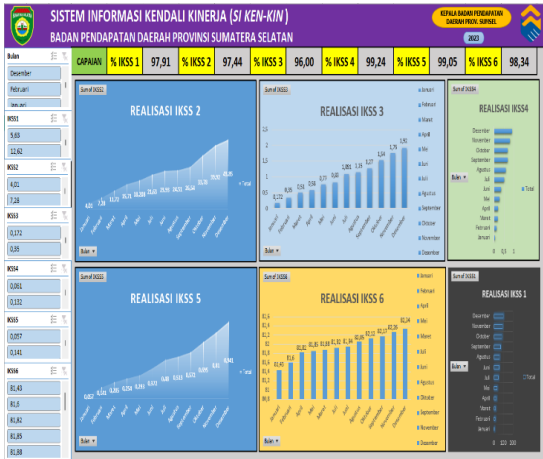
2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah. Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

D. Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Dalam Peningkatan Kinerja

Pemantauan atas kinerja yang tertuang di dalam Laporan KITAB telah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi dalam peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut :

No.	Sistem Informasi	Kegunaan
1.	e performance  The screenshot shows the 'E-PERFORMANCE' dashboard for the South Sumatra Provincial Government. It features a table titled 'DATA UNIT KERJA' with columns for Unit, Name, Position, and various performance indicators. The table lists several units, including Badan Penyelenggara Dana Desa, and their respective performance metrics.	1. Pemantauan kinerja secara berkala waktu (triwulan/bulanan) 2. Sebagai early warning atas kinerja yang tidak tercapai 3. Menjadi rekomendasi perbaikan atas kinerja yang tidak tercapai dengan melakukan upaya perbaikan
2.	e SAKIP Reviu  The screenshot shows the 'e-SAKIP REVIU' dashboard. It displays a table with columns for OPD, RUMD, Rencana, RU, Renja/TKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, and Lainnya. The table lists various OPDs (Organisasi Perangkat Daerah) and their corresponding SAKIP documents and plans.	1. Dokumen kendali atas akuntabilitas kinerja instansi 2. Update dokumen rencana aksi perbaikan 3. Update dokumen tindak lanjut atas rekomendasi APIP / Kemenpan RB
3.	Web site Bapenda  The screenshot shows the BAPENDA website. It features a banner for 'Bayarlah Pajak Kendaraan Anda Tepat Waktu' and a table with columns for Profile, Informasi, Pelayanan, Publikasi, PPD, Gallery, Info Publik, and WRPJ. The table lists various BAPENDA documents and services.	1. Sebagai sarana publikasi dokumen akuntabilitas kinerja instansi 2. Sebagai sarana komunikasi dual arah antara Bapenda dengan masyarakat 3. Transparansi dalam penggunaan sumber daya untuk pelayanan publik

4.	e Dempo		1. Peningkatan pendapatan berbasis android 2. Kemudahan memberikan pelayanan kepada wajib pajak	kinerja daerah aplikasi dalam pelayanan
5.	e signal		1. Peningkatan pendapatan berbasis android 2. Kemudahan memberikan pelayanan kepada wajib pajak	kinerja daerah aplikasi dalam pelayanan
6.	SiMDA		1. Pemantauan daya serap sebagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2. Kendali program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis PD	daya anggaran pelaksanaan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis PD
7.	e PKB		1. Pemantauan pendapatan atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor	kinerja daerah atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor

8.	e SOP 	1. SOP Pemantauan Kinerja 2. SOP Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3. SOP Manajemen Risiko 4. SOP RATL Reformasi Birokrasi	
9.	e Simpeg 	1. SKP terintegrasi dengan kinerja individu	
10.	Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN) 	Kepala Badan	

11. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)

Kepala Bidang Pajak



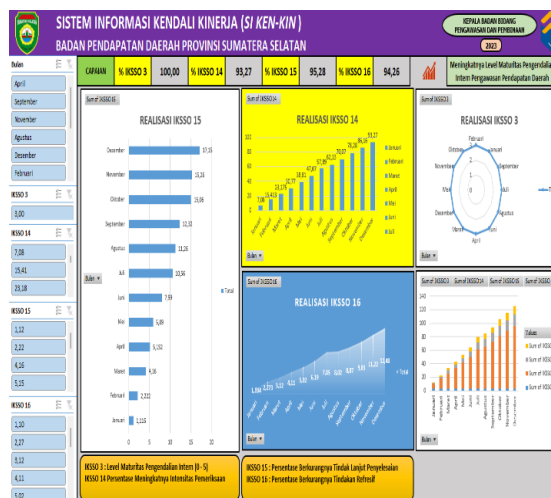
12. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)

Kepala Bidang PDLL

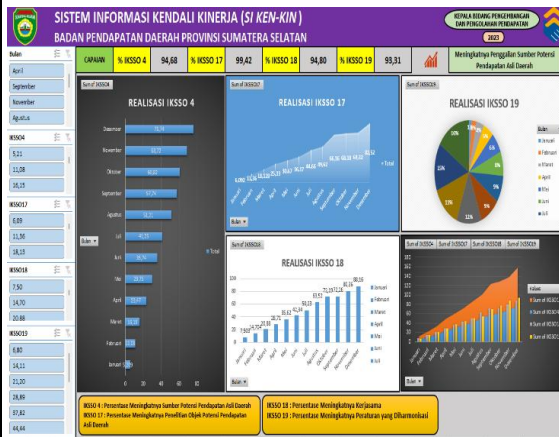


13. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN)

Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan



14. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN) Kepala Bidang P2PATDA



15. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN) Sekretariat



16. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN KIN) UPTB Puslia



E. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Berikutnya

Atas pemantauan dan evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Periode Triwulan II (April – Mei – Juni) tahun 2026, beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:

- a. Periode Triwulan II tahun 2026 mengalami trend kenaikan dalam pencapaian kinerja apabila dibandingkan pada Triwulan II tahun 2025, hal ini sehubungan dengan telah dilakukan akselerasi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Triwulan II tahun 2026 agar dapat meningkatkan kinerja sasaran strategis yang ingin di capai pada akhir periode tahun 2026;
- b. Pemantauan dan evaluasi secara kesinambungan memberikan dampak positif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- c. Perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan pada 6 (enam) elemen pelayanan publik yang dinilai masih memiliki kinerja yang rendah;
- d. Tingkatkan pengawasan berbasis risiko dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai;
- e. Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
- f. Kerja kolaboratif antar unit bidang terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD;
- g. Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dilaksanakan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja Pendapatan Daerah;
- h. Manfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengukur kinerja yang telah dibangun antara lain, e – performance, e SAKIP reviu, web site bapenda, e – dempo, e – signal, SOS, e PAP, e PBB dan sebagainya;
- i. Lakukan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang leveling pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);
- j. Menerapkan manajemen risiko dalam melakukan pencapaian atas kinerja, agar resiko sebagai akibat kegagalan dalam proses tidak terjadi dan lakukan pemantauan dan dikendalikan secara kontinue;

- k. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.
- l. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diteruskan ditingkatkan pada periode berikutnya;
- m. Gunakan analisa logical framework dan critical success factor dalam melaksanakan perbandingan data kinerja dengan sasaran yang ingin dicapai dengan kriteria yang memenuhi SMART yaitu:
 - 1. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - 2. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - 3. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - 4. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - 5. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan.



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAB V

PENUTUP

Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Triwulan II Tahun 2026



Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud atas pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara berkala waktu (triwulanan/bulanan) Triwulan II (April – Mei – Juni) tahun 2026. Laporan KITAB menyajikan data dan fakta pelaksanaan kinerja yang dilakukan melalui program kegiatan sub kegiatan strategis untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus didukung ketersediaan dana dan sumber daya serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Hasil evaluasi dan tindaklanjut dari Laporan KITAB ini menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : Misi ke 3 (tiga) "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive, walaupun beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan karena melemahnya perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kurang baik sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, hal tersebut menjadi salah satu sebab tidak tercapainya target penerimaan. Hal ini menjadi pertimbangan dan acuan dalam pencapaian kinerja pada masa selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja dan Fakta Bapenda (KITAB) Triwulan II Tahun 2026 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja selama kurun waktu Triwulan II tahun 2026 serta bahan acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Triwulan III tahun 2026 yang akan datang.

Palembang, 13 Juli 2026

**KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**
DR. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001